

## ABSTRAK

**Deni Sastra Dinata (2023). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi Dalam Menjatuhkan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019***

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelanggaran pemilihan umum yang terjadi di Kota Cimahi tahun 2019 yang tercatat sebanyak 13 kasus pelanggaran yang meliputi pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cimahi yang memiliki peran strategis pada pemilihan umum senantiasa melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pada realitanya pelanggaran pemilihan umum masih saja kerap terjadi yang akan berpengaruh pada proses jalannya pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat.

Dengan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Berbagai bentuk pelanggaran pemilihan umum yang terjadi di Kota Cimahi. 2). Pelaksanaan sanksi hukum oleh Bawaslu terhadap pelanggaran pemilihan umum di Kota Cimahi. 3). Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap tugas dan fungsi Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilihan umum.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berdasar pada konsep siyasah dusturiyah yang menjadi prinsip pokok pengaturan suatu negara. Dalam hal ini bahwasannya pengawasan pemilihan umum merupakan bagian dari tanggung jawab negara (Bawaslu). Demi mewujudkan demokrasi yang bersih, jujur, adil dan berorientasi terhadap kemaslahatan sesuai dengan Al- Qur'an surat Al-An'am ayat 48.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitiannya kualitatif. yakni penelitian berdasarkan fenomena dilapangan, Sumber data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka yang berhubungan dengan pelanggaran pemilihan umum.

Penelitian ini disimpulkan : 1). Pada seluruh tahapan pemilihan umum di Kota Cimahi tahun 2019 terdapat 3 temuan dan 10 laporan mengenai pelanggaran pemilihan umum. Dengan rincian 1 kasus pelanggaran kode etik, 3 kasus pelanggaran pidana, 3 kasus pelanggaran administrasi. 2). Sanksi yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Cimahi terhadap pelanggaran pemilu yakni dengan cara mengajukan rekomendasi perbaikan terhadap pelanggaran administrasi, melakukan teguran tertulis dan mengajukan rekomendasi terhadap pelanggaran kode etik, melakukan penindaklanjutan terhadap sentra Gakkumdu bagi pelanggaran pidana. 3). Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap sanksi hukum yang dijalankan oleh Bawaslu terhadap pelaku pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 di Kota Cimahi adalah upaya menegakan keadilan untuk kemaslahatan sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dan selaras dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58.

**Kata Kunci :** *Bawaslu, Pelanggaran Pemilu, Siyasah Dusturiyah*